

## Perjuangan Lembaga Swadaya Masyarakat Koalisi Perempuan Indonesia Kota Semarang dalam Membela Hak-Hak Buruh Perempuan di Kota Semarang

Luwes Tri Utami<sup>1</sup>, Puji Lestari<sup>1</sup>, Eko Handoyo<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang

### Article Info

#### Article history:

Received Sept 12<sup>th</sup>, 2016  
 Accepted Nov 26<sup>th</sup>, 2017  
 Published Jan 15<sup>th</sup>, 2017

#### Keyword:

Struggle; NGO; KPI;  
 women rights workers

### Abstract

*The role of women in the increase in activity of income, has lasted for so long. Along with the rapid progress industry in cities have pushed female workers into the sector. This leads to the increasing the number of job seekers female who did not accompanied by job are available so that allegedly they have to accept payment system and social security and occupational safety by the company, though often reflect treatment discriminatory and exploitation in various companies/industry. This study attempts to analyze perjuangan obstacles ngos coalition women in indonesia semarang city in defending hak-hak workers women in semarang city. This research result indicates that struggle ngos coalition women in indonesia semarang city in defending hak-hak workers women in semarang city done through politics is included in the wages council and advocacy or penjemabatan cases rights workers .Through the field non political done by providing information or training for workers in the form of education in class .In addition , the obstacles coalition women in indonesia semarang city covering internal problems of the time , and constraint ekstern derived from workers fear of workers , time , and thought pragmatic .Advice provided is increase it members and the performance of interest groups workers.*

**Paper type:** Research Paper

Copyright © 2017 Unnes Political Science Journal. All rights reserved.

#### How to cite (APA Style):

Utami, L., Lestari, P., & Handoyo, E. (2017). Perjuangan Lembaga Swadaya Masyarakat Koalisi Perempuan Indonesia Kota Semarang dalam Membela Hak-Hak Buruh Perempuan di Kota Semarang. *Unnes Political Science Journal*, 1(2), 150-159. Retrieved from <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/upsj/article/view/20099>

## PENDAHULUAN

Peran serta perempuan dalam aktivitas peningkatan pendapatan, sudah berlangsung begitu lama. Peran tersebut berawal dari keterlibatan mereka di sektor pertanian maupun perkebunan. Seiring dengan pesatnya kemajuan dunia industri di perkotaan telah mendorong tenaga kerja perempuan memasuki sektor tersebut sebagai tenaga kerja dalam

#### Corresponding Author:

Universitas Negeri Semarang, Indonesia  
 Jl. Raya Sekaran, Gunung Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah 50229, Indonesia.  
 Email: [luwestriutami@gmail.com](mailto:luwestriutami@gmail.com)

upaya meningkatkan pendapatan keluarga. Hal ini menyebabkan meningkatnya jumlah pencari kerja perempuan yang tidak diimbangi dengan lapangan kerja yang tersedia telah menciptakan persaingan yang ketat antar pencari kerja sehingga diduga mereka terpaksa bersedia menerima sistem pengupahan dan jaminan sosial serta keselamatan kerja yang ditetapkan perusahaan, meskipun sering mencerminkan perlakuan diskriminatif dan eksploitasi di berbagai perusahaan/industri manufaktur dan berbagai bentuk industri padat karya yang banyak menyerap tenaga kerja perempuan.

Perempuan bisa saja dijamin kesempatan kerja yang sama, namun pada kenyataannya di hampir semua budaya pekerja perempuan telah “dikotakkan” pada kerja tradisional jenis perempuan yang mengabaikan upah minimum bahkan seringkali justru dieksploitasi sebagai buruh murah. Pekerja perempuan juga masih sering dianggap sebagai pekerja “kelas dua” dan diperlakukan diskriminatif dengan alasan peran ganda perempuan sebagai ibu, selain sebagai pekerja, banyak menyita waktu kerjanya.

Hal inilah yang menjadi salah satu perhatian lembaga-lembaga sosial dan mendorong mereka untuk membantu memperjuangkan apa yang seharusnya diperoleh buruh perempuan. Salah satunya adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang muncul karena kesadaran akan arti pentingnya nilai-nilai kemanusiaan dan tanggung jawab pembangunan. Keberadaan LSM mampu menciptakan keserasian antara penguasa, pelaksana pembangunan (aparatur negara), dan LSM yang berjalan pada rel yang sama dengan visi yang berbeda untuk kepentingan bersama.

Oleh karena itu, Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi sebagai organisasi massa perempuan yang beranggotakan individu-individu dari berbagai macam kelompok kepentingan melakukan upaya yang sistematis untuk mewujudkan keadilan dan demokrasi dengan memastikan keterwakilan kelompok kepentingan di semua tingkatan. Sesuai dengan misi pertama Koalisi Perempuan Indonesia pasal 10 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang berbunyi, Koalisi Perempuan Indonesia menjadi agen perubahan yang membela hak-hak perempuan dan kelompok yang terpinggirkan.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Menurut Creswell (2015: 59), penelitian kualitatif dimulai dengan asumsi dan penggunaan kerangka penafsiran/teoritis yang membentuk atau memengaruhi studi tentang permasalahan riset yang terkait dengan makna yang dikenakan individu atau kelompok pada suatu

permasalahan sosial atau manusia. Objek penelitian ini adalah Lembaga Swadaya Masyarakat Koalisi Perempuan Indonesia Kota Semarang. Fokus penelitian meliputi (1) perjuangan Lembaga Swadaya Masyarakat Koalisi Perempuan Indonesia Kota Semarang dalam membela hak-hak buruh perempuan di Kota Semarang, (2) kendala yang dihadapi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Koalisi Perempuan Indonesia Kota Semarang dalam membela hak-hak buruh perempuan di Kota Semarang. Sumber data yang digunakan adalah data primer yakni informan penelitian, dan data sekunder yakni berupa dokumen. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi, sedangkan uji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Informan dalam penelitian ini antara lain adalah ketua Koalisi Perempuan Indonesia Kota Semarang, ketua kelompok kepentingan perempuan buruh, dan salah satu buruh perempuan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Munculnya organisasi masyarakat Koalisi Perempuan Indonesia di Semarang terjadi pada tahun 2003 yang dipelopori oleh ibu Ida Budiarti yang ketika itu berprofesi sebagai pengacara di LBH APIK Semarang. Pada tahun 2003, ibu Ida Budiarti mengeluarkan diri sebagai pengacara di LBH APIK Semarang, dan beliau diberi mandat untuk mendirikan organisasi masyarakat Koalisi Perempuan Indonesia di Kota Semarang. Mandat tersebut diperoleh ibu Ida Budiarti melalui jaringan perempuan di Jakarta yakni Nursabani dan Masrukah (saat ini di Komnas Perempuan) yang juga pendiri Koalisi Perempuan Indonesia di Jakarta.

Berdirinya Koalisi Perempuan Indonesia di Kota Semarang memang dibutuhkan, karena saat itu teman-teman perempuan membutuhkan wadah untuk berkumpul dan belum banyak LSM khusus perempuan yang berdiri. Tahun 2003 Koalisi Perempuan Indonesia Kota Semarang lebih eksis dibanding dengan Fathayat atau Asiyah yang lebih fokus masalah agama. Karena Koalisi Perempuan Indonesia Kota Semarang membahas masalah-masalah perempuan secara plural termasuk LGBT.

Kantor Koalisi Perempuan Indonesia Kota Semarang saat ini berada di jalan Jomblangsari IV Nomor 17 Kota Semarang. Keanggotaan Koalisi Perempuan Indonesia Kota Semarang terbuka untuk semua perempuan Indonesia yang mengalami ketidakadilan/ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan dan dari berbagai kelompok sosial. Koalisi Perempuan Indonesia Kota Semarang sebelumnya pernah

mengalami *kevacuman*, namun pada tahun 2014 ketika terpilih ketua baru yakni ibu Ani Kusri, Koalisi Perempuan Indonesia Kota Semarang mulai bangkit kembali. Semua dimulai dari awal kembali dengan membentuk Balai Perempuan dan memperkenalkan apa itu Koalisi Perempuan Indonesia Kota Semarang. Pembentukan Balai Perempuan dilakukan dalam forum Rembug Balai Perempuan yang dihadiri oleh pengurus di tingkat atasnya. Kelompok kepentingan yang ada di keanggotaan Koalisi Perempuan Indonesia Kota Semarang saat ini terdiri dari: (1) Kelompok Kepentingan Profesional yang diketuai oleh ibu Suci; (2) Kelompok Kepentingan IRT (Ibu Rumah Tangga) yang diketuai oleh ibu Masunah; (3) Kelompok Kepentingan Buruh yang diketuai oleh ibu Dian Hastuti; (4) Kelompok Kepentingan Nelayan yang diketuai oleh ibu Harini; (5) Kelompok Kepentingan Miskin Kota yang diketuai oleh ibu Tatik; dan (6) Kelompok Kepentingan Informal yang diketuai oleh ibu Siti Rohani.

Koalisi Perempuan Indonesia Kota Semarang tidak dapat berjalan sendiri untuk memperjuangkan hak-hak pekerja/buruh perempuan. Oleh karenanya Koalisi Perempuan Indonesia Kota Semarang bekerja sama dengan serikat pekerja, pengusaha, dan disnaker yang juga mempunyai andil tersendiri dalam memperjuangkan hak-hak pekerja/buruh perempuan agar terpenuhi sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan yang ada. Untuk kelompok kepentingan buruh, Koalisi Perempuan Indonesia Kota Semarang berusaha memperjuangkan hak-hak pekerja/buruh perempuan di Kota Semarang. UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menjadi dasar acuan yang digunakan oleh Koalisi Perempuan Indonesia Kota Semarang. UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan belum mengatur mengenai ruang laktasi. Menurut pasal 83 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang berbunyi bahwa pekerja/buruh perempuan yang anaknya masih menyusu harus diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja. Berdasarkan pasal 83 tersebut, dapat dilihat bahwa tidak semua pekerja/buruh mendapat izin untuk menyusui anaknya ketika jam kerja, terlebih jika jarak perusahaan dengan tempat tinggal mereka jauh, kemungkinan untuk menyusui anaknya pun akan kecil. Oleh karena itu, guna mendukung pemberian asi eksklusif untuk bayi sejak dilahirkan selama enam bulan dan penyusuan anak sampai umur dua tahun, pemerintah mengeluarkan perda yang didalamnya mengatur mengenai ruang laktasi.

Koalisi Perempuan Indonesia Kota Semarang melalui serikat pekerja juga mempunyai andil dalam mempengaruhi kebijakan mengenai pekerja/buruh. Pengaruh yang dilakukan

Koalisi Perempuan Indonesia Kota Semarang melalui serikat pekerja diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh. Salah satu contohnya adalah peningkatan besaran upah. Selain besaran upah, salah satu hak dasar pekerja/buruh perempuan yakni cuti haid, namun seringkali tidak mereka dapatkan karena prosedur rumit yang harus mereka lakukan. Berdasarkan pasal 81 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang berbunyi bahwa pekerja/buruh perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit dan memberitahu kepada pengusaha, tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid. Namun, dalam perjanjian kerja atau aturan perusahaan seolah mempersulit pekerja/buruh untuk mendapatkan cuti haid yang seharusnya mereka dapatkan. Cuti haid ini merupakan salah satu kasus yang sering terjadi dan dialami oleh pekerja/buruh perempuan. Jika ingin mendapatkan cuti haid, pekerja/buruh wajib menunjukkan surat dokter, maka pekerja/buruh yang bersangkutan baru mendapatkan cuti tanpa pemotongan gaji.

Contoh lain kasus atau pelanggaran hak pekerja/buruh bukan hanya terjadi di perusahaan/pabrik, namun juga di toko. Jika di toko jelas karyawannya tidak paham UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan karena tidak ada standar kerja disana. Toko biasanya buka pagi sampai malam, kerja hari senin sampai hari minggu. Terkadang kerja dua minggu baru dapat libur, karena memang liburnya jarang. Jika aturan ketenagakerjaan, jam kerja selama delapan jam dari hari senin sampai hari sabtu, dan hari minggu libur. Seharusnya serikat pekerja bukan hanya masuk ke perusahaan/pabrik, namun juga toko. Tidak dapat dipungkiri, pekerja toko enggan untuk masuk serikat, mereka takut untuk bergabung karena dibawah tekanan pengusaha.

Kegiatan dalam memperjuangkan hak-hak pekerja/buruh perempuan bisa dilakukan dengan salah satu upaya yakni memberdayakan pekerja/buruh perempuan agar pekerja/buruh perempuan bisa meningkatkan harkat dan martabat mereka. Program pemberdayaan pekerja/buruh perempuan dilakukan oleh Koalisi Perempuan Indonesia Kota Semarang yaitu dalam bentuk pendidikan dalam kelas yang dilakukan melalui saling tukar informasi, masukan, dan *sharing* permasalahan-permasalahan yang dialami oleh pekerja/buruh. Perjuangan Koalisi Perempuan Indonesia Kota Semarang dalam membela hak pekerja/buruh perempuan dilakukan dengan pendekatan, bukan hanya pendekatan dengan pekerja/buruh. Pendekatan ini dilakukan melalui advokasi kasus-kasus yakni dengan pendampingan terhadap pekerja/buruh. Pendekatan lain yang dilakukan yakni melalui pelatihan ke pekerja/buruh. Pelatihan yang dimaksud dapat berupa pendidikan

dalam kelas dengan tujuan penguatan kapasitas diri mereka sehingga mereka dalam diri mereka akan timbul keberanian untuk mengadvokasi diri mereka sendiri dan keluarganya.

Setiap hal yang dilakukan pasti memiliki kendala atau hambatan yang dihadapi. Sama halnya yang dilakukan Koalisi Perempuan Indonesia Kota Semarang dalam memperjuangkan hak-hak pekerja/buruh perempuan. Kendala penting diketahui sebab hal tersebut akan mengurangi dampak negatif suatu tindakan. Selain itu, dengan diketahuinya kendala, maka sesuatu yang belum ada dan belum dilakukan, diharapkan akan ada dan dilakukan. Tujuan adanya kendala yakni memberikan kritik dan saran yang membangun bagi kelangsungan suatu lembaga. Kendala *intern* utama yang dihadapi oleh Koalisi Perempuan Indonesia Kota Semarang adalah anggaran dan waktu. Karena sebagian dari anggota Koalisi Perempuan Indonesia Kota Semarang adalah perempuan dan mereka memiliki pekerjaan tetap lain sehingga waktu untuk berkumpul di Koalisi Perempuan Indonesia Kota Semarang sepenuhnya tidak bisa dilakukan. Mereka mempunyai tanggung jawab lain diluar Koalisi Perempuan Indonesia Kota Semarang. Selain itu, sumber keuangan Koalisi Perempuan Indonesia Kota Semarang dari anggota dengan sistem *gantingan* atau iuran mendadak ketika akan diselenggarakan kegiatan. Jika dirasa Koalisi Perempuan Indonesia Kota Semarang kewalahan mengenai dana, maka Koalisi Perempuan Indonesia Kota Semarang bekerja sama dengan lembaga lain.

Kendala *ekstern* atau kendala yang berasal dari luar dapat mempengaruhi gerak serikat pekerja dan Koalisi Perempuan Indonesia Kota Semarang dalam memperjuangkan hak-hak pekerja/buruh perempuan yakni kecenderungan pekerja/buruh takut jika mereka ingin memperjuangkan hak mereka meskipun serikat pekerja siap membantu. Yang dapat dilakukan oleh Koalisi Perempuan Indonesia Kota Semarang adalah penguatan kapasitas pekerja/buruh, dalam artian bahwa pekerja/buruh diberi diajak duduk bersama berdiskusi membicarakan masalah masalah yang menimpa pekerja/buruh, bagaimana penyelesaiannya, dan tindak lanjut apa yang seharusnya dilakukan pekerja/buruh sebagai langkah awal. Namun, waktu untuk ketemu antara pekerja/buruh dengan serikat pekerja diluar jam kerja memang sulit. Pekerja/buruh cenderung akan memilih pulang setelah selesai bekerja, jika tidak ada kepentingan berlebih dan mendesak. Dan pemikiran pragmatis mereka menganggap bahwa jika diundang oleh ormas atau LSM pasti ada amplop uangnya. Ketika hal tersebut dialami oleh Koalisi Perempuan Indonesia Kota Semarang dan serikat pekerja, maka mereka sejak awal menekankan bahwa pelatihan atau kegiatan yang diselenggarakan ini tidak ada fasilitas transport dan lain sebagainya.

Kegiatan tersebut murni untuk pengembangan kualitas pekerja/buruh perempuan, yang harapannya mereka bisa sadar akan hak-hak mereka sebagai pekerja/buruh.

Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam sebuah negara diidentifikasi menjadi empat bagian menurut Andra L. Corrotes dan Estie W. Suryatna (dalam Gaffar, 1999: 203), antara lain: 1. Katalisasi perubahan sistem, 2. Memonitor pelaksanaan sistem dan cara penyelenggaraan negara, 3. Memfasilitasi rekonsiliasi warga dengan lembaga peradilan, 4. Implementasi program pelayanan. Mengacu pada peranan tersebut, Koalisi Perempuan Indonesia Kota Semarang melakukan sesuai dengan prinsip yang tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koalisi Perempuan Indonesia Kota Semarang adalah demokrasi, Hak Asasi Manusia, Keadilan Gender, Non-diskriminasi, dan feminisme sebagai landasannya.

Peran pertama, katalisasi perubahan sistem yang dilakukan dengan jalan mengangkat sejumlah masalah penting dalam masyarakat, pembentukan sebuah kesadaran global, melakukan advokasi demi perubahan kebijakan negara, mengembangkan kemauan politik rakyat, dan mengadakan eksperimen yang mendorong inisiatif rakyat. Melalui peran pertama ini, Koalisi Perempuan Indonesia Kota Semarang melakukan upaya dengan melakukan kegiatan bagi perempuan dalam berbagai kelompok kepentingan yang telah ada. Khusus kelompok kepentingan pekerja/buruh, Koalisi Perempuan Indonesia Kota Semarang melakukan pelatihan dalam bentuk pendidikan dalam kelas pada tahun 2015. Pertemuan tersebut dihadiri dari perwakilan pekerja/buruh-pekerja/buruh yang ada di serikat dengan kegiatan memetakan permasalahan yang dihadapi pekerja/buruh, mencari solusi dan pemecahannya, serta memberikan pelatihan agar pekerja/buruh bisa mengadvokasi diri mereka sendiri terlebih dahulu.

Peran kedua, memonitor pelaksanaan sistem dan penyelenggaraan negara yang dilakukan bila terjadi penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran hukum, terutama yang dilakukan oleh pejabat negara dan kalangan *bussiness*. Berdasarkan peran ini, Koalisi Perempuan Indonesia Kota Semarang melalui serikat pekerja yang ada di perusahaan atau pabrik menerima dan menindaklanjuti laporan pelanggaran hak-hak pekerja/buruh perempuan.

Peran ketiga, memfasilitasi rekonsiliasi warga dengan Lembaga Peradilan. Hal ini dilakukan karena tidak jarang warga masyarakat menjadi korban kekerasan dan korban ketidakadilan. Memfasilitasi atau menjembatani biasa dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat atau organisasi massa karena mayoritas masyarakat menengah kebawah tidak

memiliki akses pembelaan dalam hukum. Salah satunya pekerja/buruh, khususnya pekerja/buruh perempuan yang seringkali mengalami diskriminasi di tempat mereka bekerja. Apalagi pekerja/buruh perempuan tak khayal memilih untuk diam ketika mengalami diskriminasi yang terjadi pada mereka. Pekerja/buruh perempuan cenderung memilih untuk tetap mempertahankan pekerjaan mereka, daripada harus menanggung resiko dipotong gaji dan bahkan di dikeluarkan dari perusahaan atau pabrik.

Peran keempat, implementasi program pelayanan. NGO dapat menempatkan diri sebagai lembaga yang mewujudkan sejumlah program dalam masyarakat. Koalisi Perempuan Indonesia Kota Semarang sejak awal berdiri di Kota Semarang pada tahun 2003 memiliki fokus permasalahan yang beragam. Permasalahan atau isu-isu dibedakan dalam konteks keanggotaan berupa kelompok kepentingan. Contohnya kelompok kepentingan pekerja/buruh, didalamnya Koalisi Perempuan Indonesia Kota Semarang bekerja sama dengan serikat pekerja dan memang anggota Koalisi Perempuan Indonesia Kota Semarang beberapa ada yang menjadi anggota serikat pekerja, sehingga Koalisi Perempuan Indonesia Kota Semarang melalui serikat pekerja menjalankan kegiatan yang berkaitan dengan pekerja/buruh bersama-sama.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam penelitian mengenai perjuangan Lembaga Swadaya Masyarakat Koalisi Perempuan Indonesia Kota Semarang dalam membela hak-hak buruh perempuan di Kota Semarang ini dapat diperoleh simpulan sebagai berikut:

1. Perjuangan Koalisi Perempuan Indonesia Kota Semarang dalam membela hak-hak buruh perempuan dilakukan melalui peranannya dalam bidang non politik, yaitu memberdayakan masyarakat dalam bidang sosial ekonomi yang diberikan dalam bentuk pemberdayaan bagi buruh perempuan melalui pendidikan dalam kelas.
2. Peranan dalam bidang politik, yaitu sebagai wahana untuk menjembatani warga masyarakat dengan negara atau pemerintah yang dilakukan dengan cara memosisikan Koalisi Perempuan Indonesia sebagai perantara atau penjemputan dan pendampingan bagi buruh yang mengalami penyimpangan dan diskriminasi hak-hak buruh ditempat mereka bekerja. Melalui serikat buruh, Koalisi Perempuan Indonesia juga melakukan upaya advokasi dengan masuk kedalam dewan



pengupahan sebagai upaya untuk mempengaruhi peningkatan upah buruh setiap tahunnya.

3. Koalisi Perempuan Indonesia Kota Semarang sebagai organisasi massa perempuan dalam menjalankan peran dan kegiatannya pasti mengalami kendala *intern* yang meliputi kendala dalam hal waktu, dan kendala *ekstern* berasal dari buruh itu sendiri yakni ketika memperjuangkan hak buruh perempuan, mereka cenderung takut, dan buruh masih memiliki pemikiran pragmatis ketika mereka diajak untuk ikut dalam kegiatan pemberdayaan untuk mereka sendiri.

### Saran

Saran yang dapat diberikan penulis berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan adalah sebaiknya ditingkatkan penguatan dan kinerja anggota Koalisi Perempuan Indonesia Kota Semarang dengan penentuan jadwal rutin kumpul. Bukan hanya kumpul ketika akan ada kegiatan saja, namun kumpul untuk menjalin keakraban sesama anggota. Untuk buruh/pekerja perempuan, sebaiknya lebih aktif ketika mengalami diskriminasi atau ketidakadilan hak-hak buruh di tempat kerja. Setidaknya ketika mengalami hal tersebut, bisa meminta bantuan serikat buruh. Serta aktif pula dalam kegiatan yang ditujukan untuk buruh, sehingga pengetahuan buruh meningkat serta timbul keberanian dan rasa percaya diri.

### DAFTAR PUSTAKA

- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi (buku saku).
- Arivia, Gadis. (2006). *Feminisme: Sebuah Kata Hati*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Creswell, John W. (2015). *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset: Memilih di Antara Lima Pendekatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gaffar, Afan. (1999). *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- PERUNDANG-UNDANGAN: UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN.
- Saidi, Zaim. (1995). *Secangkir Kopi Max Havelaar: LSM dan Kebangkitan Masyarakat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia.
- Wismulyani, Endar. (2011). *Lembaga Swadaya Masyarakat*. Klaten: Saka Mitra Kompetensi.